

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TA. 2020**





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No.05 Telp./Fax (0742) 323664

Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742) 7000 173 – 0828 740 1918

KUALA TUNGKAL – JAMBI Kode Pos : 36514

Home Page : [http // pemkab – tanjungjabung barat.go.id](http://pemkab-tanjungjabungbarat.go.id) Email : [http //bkpsdm @ pemkab – tanjungjabung barat.go.id](mailto:bkpsdm@pemkab-tanjungjabungbarat.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 360.1 / BKPSDM / 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

- Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
TANGGAL : _____ **2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Izin-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Akhir Tahun 2020 telah selesai disusun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2020 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN	
DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	26
3.3 Program dan kegiatan.....	29
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM.....	36
BAB. V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena RenjaOPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar – benar tepat guna dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun menggunakan pendekatan system management strategi (Strategi Manangement) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Akhir adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Proses penyusunan RenjaOPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu

Pada Tahun 2018 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 3 Program antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI yang terdiri dari 15 (lima Belas) kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel evaluasi dibawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2019	
					Target Renja BKPSDM tahun 2018	Realisasi Renja BKPSDM tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80

3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan yang tertib (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan	60	24	12	12	100	12	48	80

		Konsultasi (Bulan)								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik (Unit)	130	44	20	20	100	22	86	66.15
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pelayanan prima yang baik (Stel)	403	403	82	71	86.59	82	556	137.97
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									

16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
18	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	41	17	10	89	30	10	116	282.93
19	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur CPNS (orang)	854	160	93	92	98.92	200	452	52.93
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
20	Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS (orang)	950		261	215	27.33	150	365	38.42

21	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (orang)	600		150	356	669.33	150	506	84.33
22	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (orang)	38	40	4	25	100	4	69	181.58
23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji (orang)	2000		1050	1085	141.8	500	1585	79.25
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (Kasus)	33	19	12	11	220	5	35	106.06

25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	1630	18	406	614	120.44	400	1032	63.31
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang mutakhir (Buku)	180	30	50	50	100	40	70	38.89
27	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Bulan)	12		12	12	100	12	24	200
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Orang)	190		20	37	100	50	87	45.79
29	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat	Tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Orang)	250		250	304	100		304	121.60
30	Pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah formasi yang diusulkan (orang)	14000		350	197		350	350	2.50

	PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI									
31	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI (%)	500	100	100	100	100	100	300	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 2 (dua) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditemukan Kendala atau permasalahan.

Dari segi anggaran dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada umumnya dapat terserap rata-rata untuk setiap kegiatan lebih dari 85% dari total anggaran yang tersedia, sedangkan sisanya yang tidak terserap disebabkan kurangnya mengevaluasi aset yang perlu pemeliharaan. Permasalahan yang sering timbul didalam penyerapan anggaran adalah dimana tidak terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan penyerapan, Adapun fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di implementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh tiap-tiap Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang biasa didokumentasikan dalam dokumen-dokumen monitoring, evaluasi kegiatan dan cetak buku.

Untuk lebih detilnya tentang Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)	48				27,9			27,9	40,9	44	
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	24,5		12,4	13,7	15	13	13,4	15,9	17	19,2	
3	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (%)	85		73	76	79	70	71,7	77,7	82	85	
4	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan (%)	90		90	90	90	90	90	90	90	90	
5	Persentase Data ASN yang dimutakhirkan (%)	100		90	90	100	90	90	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	90				90			90	90	90	
7	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI (%)	100		100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang cukup mengedepankan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut, Sesuai dengan tugas pokoknya untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintah secara terencana, sistematis, bertahap konfrenship dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance, Sejalan dengan kebijakan Regional aparatur Negara di bidang pemerintahan yang secara substansif meliputi langkah dan upaya melalui penataan system kepegawaian, peningkatan pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas dan system pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan Good Governance dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan Responsibilitas pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap tuntutan dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang cepat dan jelas dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung

secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tenang dan sejahtera. Terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				969,600,000	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				988,891,050	
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,200,000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	5,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	66,600,000	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	97,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	113,700,000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	38,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	61,159,000	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	85,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	81,694,000	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39,670,000	

7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,600,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8,791,000	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	5,500,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	6,000,000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	BKPSDM	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	670,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	BKPSDM	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	601,077,050	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		236,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		239,480,000	
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	100%	10,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	100%	127,400,000	
12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	56,000,000	
13.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BKPSDM	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	22 Unit	150,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BKPSDM	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	22 Unit	154,330,000	
14.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	49 Unit	36,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	49 Unit	29,150,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31,500,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				27,000,000	
15.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	82 stel	31,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	82 stel	27,000,000	

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				150,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				76,780,000	
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	90,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	40,690,000	
17	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	60,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	36,090,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3,115,300,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				343,612,000	
18	Diklat Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural	2 Orang 3 Orang 5 Orang	150,000,000	Diklat Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural	29 Orang	343,612,000	
19	Diklat Prajabatan Golongan II dan III	BKPSDM	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	200 Orang	1,860,000,000						
20	Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI	- 10 JPT Pratama - 10 Administrator - 10 Pengawas	495,700,000						
21	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30 Orang	609,600,000						

22	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	45 Orang	130,000,000						
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				810,000,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				817,142,000	
23	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	261 Orang	130,000,000	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	261 Orang	62,125,000	
24	Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian kinerja	150 Org 50 Buku	110,000,000	Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian kinerja	150 Org 50 Buku	62,245,000	
25	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	Jumlah Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkualitas dan profesionalisme	6 Orang	140,000,000	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	Jumlah Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkualitas dan profesionalisme	6 Orang	299,350,000	
26	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	BKPSDM	Jumlah Berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji yang terlayani	1100 Orang	70,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	BKPSDM	Jumlah Berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji yang terlayani	1100 Orang	24,400,000	
27	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	45 OPD dan 800 Orang PNS	130,000,000	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	45 OPD dan 800 Orang PNS	109,535,000	

28	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	BKPSDM	Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Inpassing, Pembebasan, Pemberhentian dan Uji Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional	400 Orang Sumpah PNS	47,000,000	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	BKPSDM	Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Inpassing, Pembebasan, Pemberhentian dan Uji Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional	400 Orang Sumpah PNS	22,700,000	
29	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat yang tersedia	50 Buku	71,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat yang tersedia	50 Buku	69,680,000	
30	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Data Aparatur yang ter Updating	12 Bulan	97,000,000	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Data Aparatur yang ter Updating	12 Bulan	15,850,000	
31	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	BKPSDM	Jumlah penerima bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar	45 Orang	145,000,000	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	BKPSDM	Jumlah penerima bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar	45 Orang	213,382,000	
32	Pengadaan CPNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK Kab. Tanjab Barat yang tersedia	350 Formasi	900,000,000						
33	Kepangkatan	BKPSDM	Jumlah PNS yang naik pangkat	800 Orang	60,000,000	Kepangkatan	BKPSDM	Jumlah PNS yang naik pangkat	800 Orang	113,300,000	
34	Penyusunan Pola Karir ASN	BKPSDM	Jumlah Pola Karir yang tersusun sesuai dengan Kompetensi	4180 Jab	80,000,000	Penyusunan Pola Karir ASN	BKPSDM	Jumlah Pola Karir yang tersusun sesuai dengan Kompetensi	4180 Jab	11,395,000	
35	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II	80 Orang	50,000,000						

36	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	BKPSDM	Jumlah ASN yang memenuhi standar Kompetensi dan Kualifikasi	115 Orang	130,000,000	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	BKPSDM	Jumlah ASN yang memenuhi standar Kompetensi dan Kualifikasi	115 Orang	137,150,000	
37	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Penetapan Perubahan Status Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	126 Orang	90,000,000	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Penetapan Perubahan Status Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	126 Orang	38,100,000	
38	Optimailisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu	BKPSDM	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan melalui manajemen pelayanan BKPSDM Satu Pintu	100%	65,000,000						
	PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI				150,345,000	PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI				29,505,000	
39	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	70,000,000	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	29,505,000	
40	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota ASN/ KORPRI	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri	3 Kasus	80,345,000						
					7,107,745,000					3,011,880,050	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan suatu kesatuan dalam membantu tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan

yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel.
T.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang Berkualitas dan Berkompetensi .
S.2	Peningkatan Penataan SDM.
S.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Keuangan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	0	0	27,9%	40%	44%	48%
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,4%	13,7%	15%	17%	19,2%	24,5%
2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif	Peningkatan Penataan SDM	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	73%	76%	79%	82%	85%	85%
			Persentase kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	0	0	90%	90%	90%	90%
3	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	70	71	72
			Nilai AKIP	0	0	0	65	66	67
			Persentase Penurunan temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat/BPK	0	0	0	90%	90%	90%

Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Peningkatan Kompetensi Pegawai									
	a. Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	%	26.9			27.9	40.9	44.9	48.9	48.9
	b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	11.6	12.4	13.5	15.5	17.5	19.2	24.5	24.5
2	Rasio lulusan S1 Dan S2	%	45.1	59,4	66.3	67.9	73.7	80.4	84	84
3	Rasio lulusan Diploma/DIII	%	28.3	19.5	12.2	12.6	12.6	11.2	10.1	10.1
4	Rasio lulusan SLTA	%	25.4	20	20.5	18.4	12.5	8.2	5.9	5.9

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 mempunyai beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan – kegiatan untuk Tahun 2020 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
17. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
18. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
19. Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan
20. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
21. Penilaian Kinerja Aparatur
22. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
23. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
24. Peningkatan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan Status PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
25. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
26. Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat
27. Seleksi Bantuan Beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
28. Uji Kompetensi Aparatur
29. Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN PERKIRAAN MAJU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan lancar	BKPSDM	100%	969,729,500	APBD		100%	1,052,518,600
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Bulan	3,600,000	APBD		12 Bulan	3,960,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan belanja jasa Telepon, Air dan Listrik	BKPSDM	12 Bulan	66,800,000	APBD		12 Bulan	73,480,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	BKPSDM	12 Bulan	107,100,000	APBD		12 Bulan	117,810,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	57,074,553	APBD		12 Bulan	62,782,008
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPSDM	12 Bulan	97,783,500	APBD		12 Bulan	93,378,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	BKPSDM	12 Bulan	40,000,000	APBD		12 Bulan	44,000,000

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	8,805,634	APBD		12 Bulan	9,686,197
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	12 Bulan	6,000,000	APBD		12 Bulan	6,600,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minuman rapat tamu	BKPSDM	12 Bulan	3,600,000	APBD		12 Bulan	3,960,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BKPSDM	12 Bulan	578,965,813	APBD		12 Bulan	636,862,394
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	BKPSDM		449,550,000	APBD			275,055,000
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	20 Unit	199,500,000	APBD		10 Unit	100,000,000
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BKPSDM	12 Bulan	76,000,000	APBD		12 Bulan	83,600,000
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional	BKPSDM	20 Unit	155,000,000	APBD		20 Unit	170,500,000
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKPSDM	34 Unit	19,050,000	APBD		34 Unit	20,955,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	BKPSDM		56,250,000	APBD			61,875,000
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	150 Stel	56,250,000	APBD		150 Stel	61,875,000

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"	BKPSDM	100%	61,000,000	APBD			67,100,000
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	BKPSDM	12 Bulan	34,500,000	APBD		12 Bulan	37,950,000
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	BKPSDM	12 Bulan	26,500,000	APBD		12 Bulan	29,150,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural - Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM		1,321,422,500	APBD			1,332,967,500
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	BKPSDM	29 Orang	115,450,000	APBD		29 Orang	126,995,000
19	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan	BKPSDM	151 Orang	1,205,972,500	APBD		151 Orang	1,205,972,500
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi - Persentase kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	BKPSDM		1,089,810,000	APBD			1,136,996,000
20	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	BKPSDM	150 Orang	62,125,000	APBD		150 Orang	68,337,500

21	Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja	BKPSDM	1573 Orang	107,545,000	APBD		1573 Orang	118,299,500
22	Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Berkualitas dan Profesionalisme	BKPSDM	10 Orang	183,050,000	APBD		4 Orang	139,560,000
23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Jumlah berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN Dan Penghargaan ASN yang terselesaikan	BKPSDM	1050 Orang	25,000,000	APBD		1050 Orang	27,500,000
24	Peningkatan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan Status PNS Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	BKPSDM	5 Kasus 480 Orang	109,230,000	APBD		5 Kasus 480 Orang	120,153,000
25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terlaksananya Pengangkatan dari CPNSD ke PNSD dan Sumpah PNSD	BKPSDM	435 Orang	28,700,000	APBD		435 Orang	31,570,000
26	Seleksi Bantuan Beasiswa Kab.Tanjab Barat	Terselenggaranya Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa	BKPSDM	150 Orang	352,805,000	APBD		150 Orang	388,085,500
27	Uji Kompetensi Pejabat Aparatur	Jumlah ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dan Kualifikasi	BKPSDM	115 Orang	149,950,000	APBD		115 Orang	164,945,000
28	Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Upto Date	BKPSDM	12 Bulan	41,900,000	APBD		12 Bulan	46,090,000
29	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI	BKPSDM	100%	29,505,000	APBD		100%	32,455,500
					3,947,762,000				3,926,512,100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Kepangkatan

- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Peningkatan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan Status PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Penilaian Kinerja Aparatur
- Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Pola Karir ASN
- Uji Kompetensi Pejabat Administrator
- Uji Kompetensi Aparatur
- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat
- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
- Pengadaan CPNS dan PPPK
- Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kab. Tanab Barat
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Seleksi Bantuan Beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
- Rapat Koordinasi Kepegawaian
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
- System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian
- Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri dan LKBH Korpri
- Peringatan KORPS Pegawai Republik Indonesia

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
- Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan
- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
- Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Prajabatan
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Fungsional

BAB V

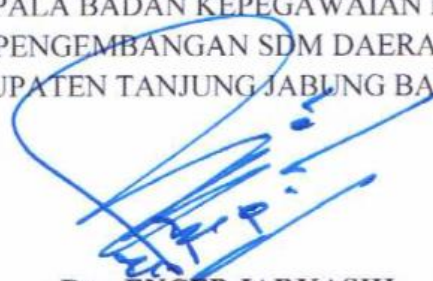
PENUTUP

Renja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001